

INSTANSI PEMKOT TELADANI KURANGI SAMPAH

Warga Asrama Ikut Tanggung Jawab Kelola Sampah

YOGYA (KR) - Upaya Pemkot Yogya dalam menekan jumlah sampah yang harus disetorkan ke TPA harus diikuti di tingkat masyarakat. Tak ketinggalan warga yang tinggal di asrama atau indekos juga dituntut bertanggung jawab dalam mengelola sampah.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengungkapkan banyak teknologi yang bisa digunakan untuk mengelola persampahan. "Kemarin kita sudah menggulirkan program Mbah Dirjo atau mengelola limbah dan sampah dengan biopori ala Jogja. Itu bisa menjadi model untuk diterapkan di elemen paling bawah. Harapan kita juga termasuk para warga indekos," ungkapnya, Selasa (1/8).

Menurutnya, biopori menjadi salah satu teknologi yang paling mudah dan murah untuk diterapkan dalam mengelola sampah jenis organik. Masyarakat tinggal membuat lubang untuk menaruh sampah organik dan mendiamkannya selama tiga minggu atau satu bulan. Selanjutnya sampah tersebut dapat dipanen sebagai pupuk kompos dan lubang tersebut dapat dipergunakan kembali.

Seluruh bank sampah di Kota Yogya juga sudah mengulirkan sistem biopori di samping tetap konsisten mengelola sampah anorganik. Singgih berharap warga indekos dapat berkoordinasi dengan pengurus RT atau RW setempat guna mengelola sampah organik dengan sistem Mbah Dirjo.

"Kita semua harus guyub dan bersama-sama dalam menangani sampah. Harapannya sampah organik sudah selesai di tingkat masyarakat. Tidak hanya warga kota saja tetapi semua yang tinggal di sini baik rumah tangga, penghuni kos, asrama, pendatang dan semuanya harus ada rasa peduli," urainya.

Jumlah warga indekos mau-

pun yang beraktivitas di Kota Yogya diakuinya cukup banyak. Bahkan jumlahnya bisa dua kali lipat dari penduduk kota. Hal ini karena jumlah penduduk di Kota Yogya tercatat sekitar 400.000 orang, sedangkan yang beraktivitas pada siang hari mencapai 1,2 juta orang. Otomatis jumlah sampah yang dihasilkan juga cukup tinggi. Belum lagi ditambah pengunjung atau wisatawan yang datang berlibur maupun urusan dinas.

Oleh karena itu, imbuh Singgih, pihaknya telah meminta aparat di wilayah baik mantri pamong praja maupun lurah untuk melakukan sosialisasi pengelolaan sampah ke seluruh elemenarganya. Pengelola asrama

maupun indekos seyogyanya bergerak menerapkan teknologi pengelolaan sampah. Selain biopori bisa juga menggunakan sistem lodong sisa dapur atau losida.

"Bahkan bisa juga biolos yang merupakan integrasi biopori dan losida. Biolos ini juga sedang kita coba gunakan di kompleks Balaikota karena untuk melakukan panen lebih mudah," tandasnya.

Di samping itu, instansi Pemkot Yogya kini juga meneladani pengurangan sampah. Salah satunya setiap jamuan makan minum agenda rapat baik yang dilakukan oleh internal maupun yang melibatkan tamu, tidak lagi menyediakan sistem dos dan botol minum. Jamuan tersebut

diberikan ala prasmanan sehingga tidak ada sampah yang ditimbulkan. Langkah tersebut diharapkan juga diikuti oleh perkantoran swasta maupun industri. Hal ini karena jumlah sampah yang harus dikurangi masih membutuhkan kerja keras.

Sejauh ini, dengan program gerakan zero sampah anorganik maupun Mbah Dirjo, jumlah residu sampah sudah berkurang dari sebelumnya 300 ton per hari menjadi hampir menyentuh 200 ton per hari. Saat ini TPA Piyungan dibuka terbatas untuk menampung sampah dari Kota Yogya hanya 100 ton per hari. Sehingga sisanya harus dikerjasamakan dengan daerah lain maupun dikelola sendiri. (Dhi)-f

BANK BPD DIY DEKATKAN LAYANAN

Resmikan Gedung KCP Sokonandi



KR-Riyana Ekawati

Santoso Rohmad dan Ponco Hartanto, saat meresmikan Kantor Cabang Pembantu Sokonandi.

YOGYA (KR) - Bank BPD DIY resmikan gedung kantor layanan baru di wilayah Kota Yogyakarta, yakni Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sokonandi di kompleks Kantor Kejaksaan Tinggi DIY (Kejati DIY). Kantor layanan baru tersebut diresmikan oleh Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad dan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Ponco Hartanto MH bersamaan dengan peresmian Adhyaksa Mart, Senin (31/7).

Santoso Rohmad mengatakan, adanya KCP Sokonandi tersebut diharapkan mampu memberikan layanan perbankan kepada masyarakat sekitar. Mengingat di wilayah Sokonandi ada beberapa sekolah dan instansi seperti Kejati dan Kejari. "Kantor layanan Bank BPD DIY ini diharapkan mampu memberikan layanan perbankan kepada para pegawai instansi tersebut. Selain itu juga menangkap dan mengembangkan peluang bisnis di bidang layanan digital banking, kredit maupun dana," ungkap Santoso.

Menurutnya, layanan perbankan yang dimiliki oleh Bank BPD DIY sudah sangat lengkap sehingga setiap kebutuhan transaksi finansial masyarakat dapat dilayani di Bank BPD DIY.

"Layanan digital Bank BPD DIY juga sangat lengkap tidak kalah dengan perbankan nasional lainnya," ujarnya. Gedung kantor layanan tersebut sedikit berbeda dengan kantor Bank BPD DIY lainnya yakni mengadopsi konsep industrial modern dan minimalis.

Sementara itu, Ponco Hartanto MH menyambut baik langkah Bank BPD DIY tersebut dengan harapan mampu bersinergi dengan berbagai pihak untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu di tempat yang sama juga diresmikan Adhyaksa Mart yang merupakan sebuah toko yang dikelola oleh Koperasi Pegawai Kejati DIY dan menyediakan aneka barang kebutuhan sehari-hari. Peresmian tersebut juga dihadiri oleh jajaran Direksi Bank BPD DIY, Wakil Kejati DIY beserta jajarannya. (Ria)-f

YOGYA (KR) - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) bakal diperluas hingga menjangkau tiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Yogya. Upaya tersebut agar skema penanggulangan bencana menjadi lebih tertata dan terencana dengan baik.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogya Nur Hidayat, mengungkapkan dokumen RPB sebenarnya harus dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. "Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Sehingga dokumen RPB yang disusun ini akan menyeluruh, terarah dan terpadu di Kota Yogya. Setiap OPD dan stakeholder di pemerintahan wajib memiliki dokumen RPB," urainya di sela-sela seminar penyusunan RPB, Selasa (1/8).

Seminar kemarin melibatkan banyak unsur mulai lembaga swadaya

masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dunia usaha serta pemerintahan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa menghasilkan model perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif, terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh.

Sekretaris BPBD Kota Yogya Agus Maryanto, menambahkan RPB yang tengah disusun tersebut untuk periode 2023-2028. Di dalamnya menyangkut penanggulangan bencana mulai dari aspek pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Harapan Buruh Yogya Raih Kesejahteraan Lewat Koperasi

YOGYA (KR) - Lahirnya koperasi-koperasi buruh sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan buruh di luar upah. Menurut Ketua Partai Buruh Exco DIY Irsyad Ade Irawan, serikat buruh melalui koperasi dapat mewujudkan demokrasi ekonomi.

"Adanya koperasi akan membuat buruh tak lagi terasing dari produk yang dihasilkan," terang Irsyad dalam diskusi bertajuk 'Sinergi Multisektor untuk Menguatkan Koperasi Pekerja/Buruh Demi Terwujudnya Kesejahteraan Sosial' di Yogyakarta, Senin (31/7).



KR-Istimewa

Para narasumber dalam diskusi 'Sinergi Multisektor untuk Menguatkan Koperasi Pekerja/Buruh Demi Terwujudnya Kesejahteraan Sosial'.

Menurut Awan, seluruh kegiatan koperasi mutlak menjadi milik dari seluruh anggota. Konsep ini dianggap Awan mampu mengahapus perbedaan ketimpangan, dan ketidaksetaraan antara pengusaha dan pekerja.

"Dapat dikatakan, koperasi merupakan gerakan pekerja. Esensi dari koperasi adalah kepemilikan bersama. Nilai-nilai demokrasi berkembang di dalamnya. Relasi buruh dan perusahaan setara," urai Awan.

Menanggapi keinginan buruh untuk membangun koperasi demi meningkatkan kesejahteraan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Sri Nurkyatsiwi menilai model koperasi modern bisa menjadi pilihan.

Koperasi modern, menurut Siwi adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan cara-cara baru dengan manajemen tata kelola koperasi yang baik dan memiliki daya saing serta adaptif dalam perubahan. (Dev)-f

MITIGASI BENCANA DAPAT PORSI BESAR

Dokumen RPB Sasar Tiap OPD

"Tiap aspek tersebut kita buat perencanaan. Itu yang penting. Misal saat pra bencana selama ini daya dukungnya masih sedikit. Nah, bagaimana ke depan ini bisa lebih dikuatkan dukungan anggarannya," imbuhnya.

Dicontohkannya pada negara maju seperti Jepang, mitigasi atau pra bencana justru mendapat porsi anggaran yang tinggi. Hal itu menjadi inovasi dan terbukti jatuhnya korban baik materi maupun jiwa bisa diminimalisir. Dengan begitu, kebutuhan anggaran untuk penanganan saat bencana dan pasca bencana juga semakin efektif. Selama ini di Indonesia, anggaran untuk pra bencana masih minimalis sedangkan anggaran pasca bencana

jauh lebih besar.

Selain itu dalam dokumen RPB juga mempertimbangkan tema-tema kebencanaan sesuai OPD. Seperti halnya di sektor pariwisata perlu ada upaya mitigasi yang lebih spesifik. Selain titik kumpul serta kekuatan bangunan juga tempat parkir yang harus terdapat dengan desain yang tidak berliku. Tempat parkir tanggap bencana akan memudahkan armada bus pariwisata dalam melakukan evakuasi.

"Jadi tinggal lurus saja, tidak perlu lurus belak-belok. Itu misalnya mitigasi di sektor pariwisata. Begitu juga di OPD lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya, semua akan masuk dalam dokumen RPB," urainya. (Dhi)-f

TAK SEBATAS BERBASIS KAMPUNG

Fungsi Gerakan Panca Tertib Diperluas

YOGYA (KR) - Gerakan panca tertib (pantib) yang sudah digulirkan sejak tahun 2015 lalu, skalanya terus diperluas. Terutama menyangkut fungsi dan tujuan gerakan tersebut yang tidak hanya berbasis kampung melainkan juga lembaga pendidikan atau sekolah.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, menjelaskan perluasan gerakan panca tertib di sekolah sebenarnya sudah diawali dengan munculnya program Pantib for School. Akan tetapi perluasan tersebut kini diperkuat lagi dengan program Berkah atau Bergerak Bersama Sekolah.

"Muaranya tetap sama seperti gerakan kampung panca tertib, yakni bagaimana agar ketertiban menjadi gaya hidup di lingkung-

an masyarakat baik di kampung, sekolah maupun komunitas lainnya," urainya, Senin (31/7).

Sesuai dengan namanya, gerakan panca tertib mengedepankan lima unsur ketertiban. Masing-masing ialah tertib lingkungan, tertib bangunan, tertib sosial, tertib daerah milik jalan, dan tertib usaha. Gerakan kampung panca tertib hingga saat ini setidaknya sudah dijalankan pada 140 kampung. Seluruh kampung yang ada di Kota Yogya bakal didorong mampu menjalankan gerakan tersebut. Sedangkan pada program Pantib for School setidaknya sudah ada sepuluh sekolah. Sementara pada program Berkah, salah satunya sudah dideklarasikan di SMP Joannes Bosco Yogyakarta. Octo menjelaskan pihaknya

akan mendorong lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Yogya untuk bisa menerapkan gerakan panca tertib. Setidaknya memiliki kesadaran atau fokus dalam menjaga salah satu aspek ketertiban. "Khusus pada program Berkah ini kami ingin mencegah kenakalan remaja dari sekolah. Gerakan untuk sekolah disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing sehingga antara satu sekolah dan lainnya akan berbeda fokusnya," paparnya.

Sementara itu Kepala SMP Joannes Bosco Yogyakarta Agnes Indiah Ekowati, merespons baik pencanangan Berkah di sekolah yang dipimpinnya. Dirinya berharap ke depan kondisi keamananan dan ketertiban di ling-

kungan sekolah dan sekitarnya akan semakin meningkat. Bahkan pihaknya berkomitmen tidak hanya pada salah satu unsur ketertiban saja melainkan seluruh aspek dalam panca tertib.

Untuk tertib lingkungan dengan rutin menggelar edukasi kesadaran lingkungan sekitar kepada siswa. Tertib bangunan dengan cara pengenalan bangunan cagar budaya dan memberikan edukasi pencegahan vandalisme. Tertib sosial dengan pencegahan kejahatan jalanan dan edukasi penggunaan media sosial yang baik dan benar. Tertib daerah milik jalan dengan cara memberikan edukasi keselamatan lalu lintas. Sedangkan tertib usaha dengan rutin memberikan edukasi larangan mengkonsumsi produk terlarang. (Dhi)-f

PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN
Jln. KRT. Pringgodingrat No.1 Beran, Sleman Telp. (0274) 868401
E-mail : pnsleman@yahoo.co.id | Site : pn-sleman.go.id

**PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI PENGADILAN**
No : 17/Pdt.Eks/2022/PN.Smn

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Februari 2023 No : 17/Pdt.Eks/2022/PN.Smn, serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tertanggal 7 Juli 2023 No : S-2215/KNL.0905/2023, dengan ini Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1 Beran, Sleman, 555811, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (Closed Bidding) atas objek sengketa perkara perdata No : 17/Pdt.Eks/2022/PN.Smn, dalam perkara antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Panca Arta Monjali
Alamat di Jalan Magelang Km.9 Sendangadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ----- sebagai Pemohon Eksekusi;

M e l a w a n

- Nyonya Sri Rahayu**, alamat : di Krapyak Kulon RT.001/RW.00 Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon Eksekusi I**;
- Tuan Sudi Lalfalianto**, alamat : di Patukan RT.08/RW.022 Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon Eksekusi II**.

Yaitu berupa :
Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya tanpa kecuali, tercatat dalam SHM Nomor : 1472/Ambarketawang luas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), Gambar Situasi Nomor 2.973 tanggal 03/04/1996, tanggal penerbitan sertifikat 24/09/1996, atas nama Tuan Sudi Lalfalianto yang terletak di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah - Sebelah Barat : Rumah Bapak Agus Susanto
- Sebelah Selatan : Jalan - Sebelah Timur : Rumah Bapak Bambang

**Nilai Limit : Rp. 860.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
Nilai Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 172.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).**

Yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Rabu / 16 Agustus 2023
Batas Akhir Penawaran : 10.00 waktu server aplikasi lelang melalui internet sesuai WIB
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No.11 Yogyakarta

Penetapan Penemuan : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon Peserta Lelang dapat melihat objek Lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet dengan penawaran secara tertutup (Closed Bidding) yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. "Tata cara dan prosedur panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan Akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file ".jpg", ".png"), dan nomor Rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai Kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa notariil, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file.
- Jaminan Penawaran Lelang :
 - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman Lelang, disetorkan sekaligus (bukan diciali).
 - Setoran jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - Jaminan disetor ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memenuhi barang yang dilelang.
- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirim kembali-kali.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli/pemenang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Kas Negara. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang juga dikenai kewajiban pembayaran BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
- Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgodingrat No.1 Beran Sleman Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544091, 561909.

Sleman, 2 Agustus 2023

An. **KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN**
PANITERA
H. SUMARGI, SH., MH.
NIP. 19710707 199103 1 005